

**PENGARUH HASIL PEMERIKSAAN BPK
TERHADAP KINERJA KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH
(Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah)**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)
pada Program Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis
Universitas Diponegoro

Disusun oleh:

ENDRI PARWANTO
NIM. 12030114183011

**FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Endri Parwanto
Nomor Induk Mahasiswa : 12030114183011
Fakultas/Jurusan : Ekonomika dan Bisnis/Akuntansi

Judul Usulan Penelitian Skripsi : **PENGARUH HASIL PEMERIKSAAN
BPK TERHADAP KINERJA
KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**

Dosen Pembimbing : Puji Harto, S.E., M.Si., Akt., Ph.D.

Semarang, Desember 2016
Dosen Pembimbing,

Puji Harto, S.E., M.Si., Akt., Ph.D.
NIP 197505272000121001

PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN

Nama Mahasiswa : Endri Parwanto
Nomor Induk Mahasiswa : 12030114183011
Fakultas/Jurusan : Ekonomika dan Bisnis/Akuntansi

Judul Usulan Penelitian Skripsi : **PENGARUH HASIL PEMERIKSAAN
BPK TERHADAP KINERJA
KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**

Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal.....2016

Tim Penguji:

1. Puji Harto, Ph.D
2. Dwi Cahyo Utomo, Ph.D
3. Agung Juliarto, Ph.D

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Endri Parwanto, menyatakan bahwa skripsi dengan judul: **PENGARUH HASIL PEMERIKSAAN BPK TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**, adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan/atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin itu, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas, baik disengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila dikemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, Desember 2016
Yang membuat pernyataan,

Endri Parwanto
NIM. 12030114183011

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Yakinlah ada sesuatu yang menantimu selepas banyak kesabaran (yang kau jalani) yang akan membuatmu terpana hingga kau lupa pedihnya rasa sakit (kesabaran)”

(Ali bin Abi Thalib)

Skripsi ini penulis persembahkan untuk *Umak* dan *Ebak* tercinta. Semoga keberkahan selalu menyertai mereka.

ABSTRACT

This study aimed to analyze the effect of the audit results by BPK on the financial performance of local government in Jawa Tengah Province. The variables in this study are audit opinion, audit findings, the follow up of audit results, and timeliness in reporting financial statements. The financial performance measures are using effectiveness ratio and efficiency ratio.

This study uses secondary data from audit report by Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia and financial statements of local government in Jawa Tengah Province in 2013 and 2014. The data and hypothesis are tested by using partial least square (PLS) method.

The results showed that not all of the audit results by BPK have a significant effect on financial performance of local government. Audit opinion and timeliness in reporting financial statement have a significant effect on financial performance of local government, meanwhile audit findings and the follow up of audit results have no significant effect on financial performance of local government.

Keywords: audit opinion, audit findings, the follow up of audit results, timeliness in reporting financial statement, and financial performance

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh hasil pemeriksaan BPK terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Variabel-variabel yang diuji dalam penelitian ini yaitu opini, temuan, tindak lanjut hasil pemeriksaan, dan ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Kinerja keuangan pemerintah daerah diukur dengan menggunakan rasio efektivitas dan rasio efisiensi.

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang berasal dari laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan laporan keuangan pemerintah daerah di Provinsi Jawa Tengah tahun anggaran 2013 – 2014. Pengujian data dan hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis *partial least square* (PLS).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak semua hasil pemeriksaan BPK mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah. Opini pemeriksaan dan ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, sedangkan nilai temuan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Kata kunci: Opini, temuan, tindak lanjut hasil pemeriksaan, ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan, kinerja keuangan pemerintah daerah.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil'alamin, puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmatNya berupa nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **“PENGARUH HASIL PEMERIKSAAN BPK RI TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH”**, dengan baik sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Program Sarjana Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Diponegoro.

Shalawat serta salam akan senantiasa tercurah kepada teladan dan pemimpin umat, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya yang istiqomah hingga akhir zaman.

Penulis menyadari bahwa usaha yang penulis lakukan selama masa perkuliahan sampai penyelesaian skripsi ini tidak ada artinya tanpa pertolongan dan kasih sayang Allah SWT, secara langsung maupun melalui berbagai pihak yang telah banyak membantu penulis. Oleh karena itu, penulis juga mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak dan Ibu penulis yang selalu memberikan dukungan, motivasi dan doa;
2. Bapak Hendar Ristriawan, S.H. M.H. selaku Sekretaris Jenderal BPK RI;
3. Bapak Haedar, S.E. selaku Kepala Biro Sumber Daya Manusia BPK RI;

4. Bapak Dr. Suharnomo, S.E., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro;
5. Bapak Fuad, S.E.T., M.Si., Akt., Ph.D, selaku Kepala Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro;
6. Bapak Puji Harto, S.E., M.Si., Akt, Ph.D. selaku dosen pembimbing yang bersedia meluangkan waktu dan pemikirannya untuk membimbing penulis dalam menyusun skripsi ini;
7. Aditya Septiani, S.E., M.Si., Akt., selaku dosen wali yang telah memberikan pengarahan kepada penulis selama melaksanakan studi di Universitas Diponegoro;
8. Para dosen yang telah dengan ikhlas membagikan ilmunya kepada penulis;
9. Reny Dinarianti yang selalu memberikan doa, dukungan, dan motivasi;
10. Rekan-rekan seangkatan tugas belajar BPK RI yang telah membantu penulis dalam kegiatan belajar dan menyelesaikan skripsi ini.
11. Rekan-rekan pegawai baik yang di Kantor Pusat maupun di Kantor Perwakilan Jawa Tengah yang telah banyak membantu menyelesaikan skripsi ini dalam menyediakan data pendukung.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini belumlah sempurna dan tidak luput dari berbagai kekurangan. Oleh karena itu, penulis mohon maaf atas kekurangan tersebut. Selain itu kritik dan saran membangun sangat diharapkan untuk perbaikan di masa mendatang.

Skripsi ini masih banyak kelemahan dan kekurangan, oleh karena itu saran dan kritik sangat diharapkan penulis sehingga menjadi perbaikan bagi penulis kedepannya. Akhir kata, semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis sendiri dan semua pihak yang menggunakannya.

Semarang, Desember 2016
Penulis,

Endri Parwanto
NIM. 12030114183011

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR GRAFIK	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	6
1.3. Tujuan Penelitian	7
1.4. Manfaat Penelitian	7
1.5. Sistematika Penulisan	8
BAB II TELAAH PUSTAKA	10
2.1. Landasan Teori	10
2.1.1. Teori Keagenan (<i>Agency Theory</i>)	10

2.1.2.	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	12
2.1.3.	Badan Pemeriksa Keuangan	17
2.1.3.1.	Sejarah	17
2.1.3.2.	Tugas dan Wewenang.....	18
2.1.3.3.	Opini Pemeriksaan BPK.....	21
2.1.3.4.	Temuan Pemeriksaan BPK.....	23
2.1.4.	Pengukuran Kinerja	24
2.1.4.1.	Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	24
2.1.4.2.	Rasio Keuangan Pemerintah Daerah	27
2.2.	Penelitian Terdahulu.....	29
2.3.	Kerangka Pemikiran	32
2.4.	Hipotesis	33
2.4.1.	Pengaruh Opini Pemeriksaan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	33
2.4.2.	Pengaruh Temuan Pemeriksaan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	33
2.4.3	Pengaruh Tindak Lanjut Pemeriksaan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	35
2.4.4	Pengaruh Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.....	36
BAB III METODE PENELITIAN.....		38
3.1.	Variabel Penelitian dan Definisi Operasional	38

3.1.1. Variabel Penelitian.....	38
3.1.1.1. Variabel Dependen	38
3.1.1.2. Variabel Independen.....	38
3.1.2. Definisi Operasional Variabel	39
3.1.2.1. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	39
3.1.2.1.1 Rasio Efektivitas.....	39
3.1.2.1.1 Rasio Efisiensi	39
3.1.2.2. Opini Pemeriksaan BPK.....	40
3.1.2.3. Temuan Pemeriksaan BPK.....	40
3.1.2.4. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	40
3.1.2.5. Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan	41
3.2. Populasi dan Sampel.....	41
3.3. Jenis dan Sumber Data	42
3.4. Metode Pengumpulan Data	42
3.5. Metode Analisis Data	42
3.5.1. Statistik Deskriptif.....	42
3.5.2. <i>Partial Least Square</i>	43
3.5.3. Pengujian Model Pengukuran (<i>Outer Model</i>).....	44
3.5.4. Pengujian Model Struktural (<i>Inner Model</i>)	45
3.5.5. Uji Hipotesis	47
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	47

4.1. Deskripsi Objek Penelitian	47
4.2. Analisis Data	47
4.2.1. Statistik Deskriptif	47
4.2.2. Pengujian Model Pengukuran (<i>Outer Model</i>).....	49
4.2.2.1. <i>Convegen Validity</i>	49
4.2.2.2. <i>Discriminant Validity</i>	50
4.2.2.3. Uji Realibilitas.....	51
4.2.3. Pengujian Model Struktural (<i>Inner Model</i>)	52
4.2.2.1. <i>R-Square</i>	52
4.2.2.2. Pengujian Hipotesis	53
4.3. Interpretasi Hasil	55
4.3.1. Pengaruh Opini Pemeriksaan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	55
4.3.2. Pengaruh Temuan Pemeriksaan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	56
4.3.3. Pengaruh Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	57
4.3.4. Pengaruh Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.....	58
BAB V PENUTUP.....	59
5.1. Simpulan.....	59
5.2. Keterbatasan	60

5.3. Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA	62
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	65

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1. Ringkasan Penelitian Terdahulu	31
Tabel 4.1. Rincian Populasi Penelitian	47
Tabel 4.2. Statistik Deskriptif Variabel Penelitian	48
Tabel 4.3. Nilai <i>Loading Factor</i>	50
Tabel 4.4. Hasil Uji <i>Discriminant Validity</i>	51
Tabel 4.5. Uji Realibilitas	51
Tabel 4.6. <i>R-Square</i>	52
Tabel 4.7. Hasil Pengujian <i>Inner Model</i>	53

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran	33

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran A: Hasil Uji Statistik Deskriptif.....	65
Lampiran B: Hasil Uji Validitas.....	66
Lampiran C: Hasil Uji Reliabilitas.....	67
Lampiran D: Hasil Uji Model Struktural (<i>Inner Model</i>).....	68

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelaksanaan otonomi daerah yang telah berjalan sejak 1999 memberikan keleluasaan bagi pemerintah daerah untuk mengambil keputusan serta mempunyai kewenangan luas dalam upaya mengembangkan seluruh potensi yang dimulai dengan tujuan menyejahterakan masyarakat (Mercy, 2013). Pelaksanaan otonomi daerah ini diatur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. UU No. 32 Tahun 2004 ini memberikan kewenangan yang luas kepada pemerintah daerah baik itu kabupaten maupun kota untuk mengurus rumah tangganya sendiri baik dalam bidang pembangunan, pemerintahan, dan kemasyarakatan. Selain itu, Undang-undang ini mewajibkan kepala daerah untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah kepada Pemerintah, dan memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, peluang dan tantangan persaingan global dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi

daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintah negara. Oleh karena itu pemerintah daerah harus mampu menyelenggarakan pemerintahannya agar tercipta tata kelola pemerintahan daerah yang baik. Sistem evaluasi, monitoring, dan pengukuran kinerja yang sistematis guna mengukur kemajuan yang dicapai pemerintah daerah dalam kurun waktu tertentu juga perlu diterapkan.

Pelaksanaan otonomi daerah diiringi tuntutan yang lebih besar dari masyarakat untuk dilaksanakannya transparansi dan akuntabilitas publik oleh lembaga-lembaga sektor publik (Mardiasmo, 2009). Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah, maka sesuai dengan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban yang berupa laporan keuangan. Pemerintah Daerah wajib menyusun laporan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan daerah setiap tahun yang disebut Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). LKPD terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan.

Informasi yang disajikan dalam pelaporan keuangan harus memenuhi karakteristik kualitatif sehingga dapat digunakan dalam pengambilan keputusan (Silky, 2012). Untuk menjamin terpenuhinya karakteristik kualitatif tersebut maka informasi dalam laporan keuangan perlu dilakukan pemeriksaan atas laporan keuangan untuk menilai kewajaran laporan keuangan berdasarkan prinsip akuntansi pemerintahan yang berlaku. Untuk itu, negara menunjuk suatu lembaga yang independen untuk memeriksa laporan keuangan pemerintah daerah, yaitu

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK dijelaskan bahwa BPK merupakan satu lembaga Negara yang bebas dan mandiri dalam melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara menyebutkan bahwa pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Terdapat tiga jenis pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK yaitu pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berupa temuan audit, opini audit dan rekomendasi

Dalam sistem pengelolaan keuangan daerah perlu ditetapkan standar atau acuan kapan suatu daerah dikatakan mandiri, efektif, efisien, dan akuntabel. Oleh karena itu diperlukan adanya evaluasi kinerja keuangan yang bertujuan untuk mengukur kinerja pemerintah daerah. Pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah ini dijadikan sebagai tolak ukur dalam penetapan kebijakan keuangan pada tahun selanjutnya. Menurut Chaw (dalam Sumarjo, 2010) pengukuran kinerja merupakan komponen yang penting karena akan memberikan umpan balik atas rencana yang telah diimplementasikan. Untuk menilai kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya, antara lain adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap laporan keuangan Pemda. Hasil

analisis rasio keuangan selanjutnya dipergunakan sebagai tolak ukur dalam menilai (Abdul Halim, 2007):

1. Kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan;
2. Efisiensi dan efektivitas dalam merealisasikan pendapatan daerah;
3. Sejauh mana aktivitas Pemda dalam membelanjakan pendapatan daerahnya;
4. Kontribusi masing-masing sumber pendapatan dalam pembentukan pendapatan daerah;
5. Pertumbuhan/perkembangan perolehan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan selama periode waktu tertentu.

Hasil pemeriksaan yang dilakukan BPK berupa opini pemeriksaan dan temuan pemeriksaan. Opini adalah pernyataan professional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.. Penelitian Virgasari (2009) dan Indrarti (2011) menyatakan bahwa opini audit dapat menjadi suatu tekanan bagi pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan yang baik guna menghasilkan kinerja yang baik pula.

Temuan pemeriksaan adalah himpunan dan sintesis data dan informasi yang dikumpulkan dan diolah selama pelaksanaan pemeriksaan dan disajikan secara sistematis dan analitis (Juknis Pemeriksaan LKPD, 2007). Temuan pemeriksaan Temuan pemeriksaan dapat mencakup kelemahan dalam pengendalian internal, kecurangan, penyimpangan atau ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Bernstein (2000) dalam penelitiannya

menyimpulkan bahwa banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah menggambarkan buruknya kinerja pemerintah daerah tersebut.

Selain itu, penelitian mengenai hasil pemeriksaan audit BPK juga telah dilakukan oleh Mustikarini dan Fitriasari (2012) yang menggunakan temuan audit BPK dalam menjelaskan hasil audit. Semakin banyak temuan audit menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan dari pemerintah daerah tersebut kurang baik, sehingga berpengaruh terhadap kinerja (Mustikarini dan Fitriasari, 2012).

Sesuai peraturan yang berlaku, pemerintah daerah sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan Negara wajib menindaklanjuti setiap temuan pemeriksaan yang dilakukan BPK. Tri Hartono (2006) mengemukakan bahwa tindak lanjut hasil pemeriksaan merupakan unsur yang penting dalam penilaian kinerja manajemen dalam hal ini pemerintah daerah. Kedisiplinan pemerintah dalam menyampaikan laporan keuangan secara tepat waktu juga menjadi kewajiban pemerintah daerah sebagai bentuk ketaatan pemerintah daerah terhadap ketentuan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan pemaparan tersebut, penulis bermaksud untuk menganalisa sejauh mana pengaruh hasil pemeriksaan BPK RI yaitu opini pemeriksaan, temuan pemeriksaan serta tindak lanjut hasil pemeriksaan dan ketepatan waktu penyampaian terhadap kinerja keuangan pemerintah yang diukur dengan rasio keuangan pemerintah daerah. Oleh karena itu, penulis mengajukan penelitian yang berjudul **“PENGARUH HASIL PEMERIKSAAN BPK RI TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH”**

1.2 Rumusan Masalah

Hasil pemeriksaan BPK sering kali menjadi toak ukur kesuksesan pemerintah daerah dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan daerahnya, hal ini sering kita temui di media bagaimana masyarakat sangat memperhatikan opini yang diberikan oleh BPK terhadap pemerintah daerah. Salah satu contoh yang terjadi akhir-akhir ini adalah kasus yang terjadi pada pemerintah daerah DKI Jakarta, dimana BPK memberikan opini WDP terhadap laporan keuangan pemerintah DKI Jakarta pada tahun 2014, dan hal ini langsung menjadi perhatian masyarakat terhadap kinerja pemerintahan. Oleh karena itu berdasarkan hal itu dan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya penulis ingin meneliti lebih lanjut sejauh mana hasil pemeriksaan BPK berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daera. Berikut rincian rumusan masalah dalam penelitian ini:

1. Bagaimana pengaruh dari opini pemeriksaan BPK terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah?
2. Bagaimana pengaruh dari temuan pemeriksaan BPK terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah?
3. Bagaimana pengaruh dari tingkat tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan BPK terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah?
4. Bagaimana pengaruh ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang ingin dicapai oleh penulis adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh opini hasil pemeriksaan BPK RI terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh temuan pemeriksaan BPK RI terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
3. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh tingkat tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan BPK RI terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
4. Untuk mengetahui pengaruh ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat bagi pemerintah daerah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pemerintah daerah sehingga dapat menjadi bahan pengambilan keputusan untuk meningkatkan kinerja keuangan mereka ditinjau dari hasil pemeriksaan BPK RI.

2. Manfaat bagi akademik

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi literatur bagi teman-teman mahasiswa dan pihak-pihak lain yang akan menyusun skripsi atau yang akan melakukan penelitian mengenai pengaruh hasil pemeriksaan BPK RI terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

3. Manfaat bagi peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa tambahan pengetahuan kepada penulis mengenai hubungan antara hasil pemeriksaan BPK RI terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini disusun untuk memberikan gambaran umum tentang penulisan skripsi yang akan dilakukan. Skripsi ini disusun atas lima bab dan berikut adalah uraian singkat mengenai isi dari setiap bab tersebut.

BAB I : PENDAHULUAN

Bab satu berisi gambaran mengenai isi penelitian dan permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Dalam bab satu diuraikan tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TELAAH PUSTAKA

Bab dua menguraikan landasan teori yang menjadi acuan utama dalam penelitian dan hasil penelitian terdahulu yang menjadi landasan dibentuknya hipotesis dalam penelitian ini serta memuat kerangka pemikiran.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab tiga berisi metode penelitian yang membahas mengenai uraian variabel penelitian beserta definisi operasionalnya,

penentuan populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab empat menguraikan tentang pengujian hipotesis berdasarkan data yang diperoleh beserta dengan deskripsi objek penelitian, analisis data, dan interpretasi hasil.

BAB V : PENUTUP

Bab lima menguraikan tentang kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian, keterbatasan penelitian, serta saran bagi penelitian selanjutnya.